

**PENGARUH SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2022**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Sultan Agung

Disusun Oleh:

Helmi Ardiansyah

(31402300164)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2024

LEMBAR PENGESAHAN
PENGARUH SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE 2022

Disusun Oleh :

Helmi Ardiansyah

(31402300164)

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian penelitian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 8 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Hani Werdi Apriyanti SE., M,Si, Ak.,CA
NIDN. 0616048702

**PENGARUH SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE 2022**

Disusun Oleh :

Helmi Ardiansyah

(31402300164)

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 4 April 2024

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Hani Werdi Apriyanti SE., M.Si, Ak.,CA
NIDN. 0616048702

Penguji I



Hendri Setyawan, S.E., M.PA
NIDN. 0621018204

Penguji II



Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak.
NIDN. 0612078902

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi tanggal 4 april 2024

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0611088001

PERNYATAAN KEASLIAN SKIRPSI

Nama : Helmi Ardiansyah

NIM : 31402300164

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi berjudul **“Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti usulan penelitian skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 5 Maret 2025

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '5000', 'METERAI TEMPEL', and the alphanumeric code 'EC9CCAMX174975356'.

Helmi Ardiansyah

31402300164

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan melihat pengaruh sanksi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada penerimaan PKB di Jawa Tengah tahun 2022. Jawa Tengah sebagai salah satu Provinsi terbesar di Indonesia memerlukan dana untuk membangun infrastruktur serta kegiatan daerah, pemerintah telah memberi pelayanan pada masyarakat, sehingga masyarakat diwajibkan membayar pajak. Variabel yang dipakai di penelitian ini yaitu Sanksi Pajak yang mana merupakan salah satu dari hal yang menjadi pengaruh dari penerimaan PKB yang memiliki potensi dan peranan yang besar di Provinsi Jawa Tengah.

Teknik pengambilan sampel memakai sampling dokumentasi. Sampling dokumentasi ialah tulisan atau catatan tentang kejadian yang sudah lewat. Selain bentuk tulisan, dokumentasi juga dapat berupa gambar atau karya yang menimbulkan kesan individu.. Penelitian ini memakai data sekunder yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga data berjumlah 35 yang diambil dari data tahunan pada tahun 2022. Penelitian ini memakai analisis regresi linear sederhana melalui olah data SPSS 25.0, hasil yang didapatkan melalui penelitian ini menyebutkan jika Sanksi PKB berpengaruh pada penerimaan PKB.

Kata Kunci : Sanksi Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the effect of Motor Vehicle Tax (PKB) sanctions on PKB revenues in Central Java Province in 2022. Central Java Province as one of the largest provinces in Indonesia which needs funds for infrastructure development and regional activities, the government has provided services to the community, so that the community is obliged to pay taxes. The variable used in this study is Tax Sanction which is one of the things that affect the receipt of PKB which has great potential and role in Central Java Province.

The sampling technique uses documentation sampling. Documentation sampling is writing or notes about past events. In addition to the form of writing, documentation can also be in the form of images or works that give an individual impression. Secondary data for this research was obtained from the Regional Revenue Agency Central Java Province, so that the data totals 35 taken from annual data in 2022. This study uses a simple linear regression analysis using the SPSS 25.0 data processing program, the results obtained through this study state that Motor Vehicle Tax Sanctions affect PKB revenue

Keywords : Tax Sanction Motor Vehicle, Motor Vehicle Tax

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis aturkan pada Allah SWT atas Rahmat, karunia serta hidayah-Nya penulis bisa merampungkan skripsi berjudul **“Pengaruh Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022”**. Tugas akhir skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis sepenuhnya sadar jika skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan karena mengingat penulis masih mempunyai kemampuan serta pengetahuan yang kurang. Karenanya pada bagian ini penulis ingin berterimakasih pada seluruh pihak yang sudah memberi bimbingan, arahan, bantuan dan dukungan pada penulis hingga skripsi ini bisa selesai dengan baik. Oleh sebab itu, rasa terima kasih yang dalam penulis berikan pada :

1. Allah SWT atas rahmat yang diberikan berupa kemudahan dan kelancaran saat penyelesaian tugas akhir sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Hani Werdi Apriyanti SE., M,Si, Ak.,CA, selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing serta motivasi pada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Hendri Setyawan, S.E., M.PA, selaku Dosen Penguji atas semua arahan dan bimbingan yang sudah diberikan pada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

7. Bapak Ahmad Rudi Yulianto, S.E., M.Si., Ak, selaku Dosen Penguji atas semua arahan dan bimbingan yang sudah diberikan pada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

8. Keluarga dan kerabat dekat saya tercinta yang telah memberi doa, semangat serta dukungan sehingga penulis bisa merampungkan skripsi ini dengan baik.

9. Bapak Widasena, S.STP., MM, selaku pegawai Badan Pendapatan Daerah Jawa Tengah, terimakasih telah memberi izin pada penulis untuk mengambil data sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini dengan baik.

10. Semua teman angkatan 2016 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

11. Semua pihak yang tidak bisa satu per satu disebutkan, yang membantu dan mendukung penulis saat menyusun skripsi ini baik langsung atau tidak langsung

Pada penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan serta kekurangan, oleh sebab itu semua masukan serta arahan yang membangun akan diterima dengan baik guna menyempurnakan penulisan skripsi ini. Terakhir, penulis meminta maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak sengaja, karena sempurna hanya milik Allah SWT. Penulis berharap semoga tugas akhira ini bisa memberi manfaat untuk semua pihak. Aamiin ya robbal alamin.

Semarang, 08 Agustus 2024

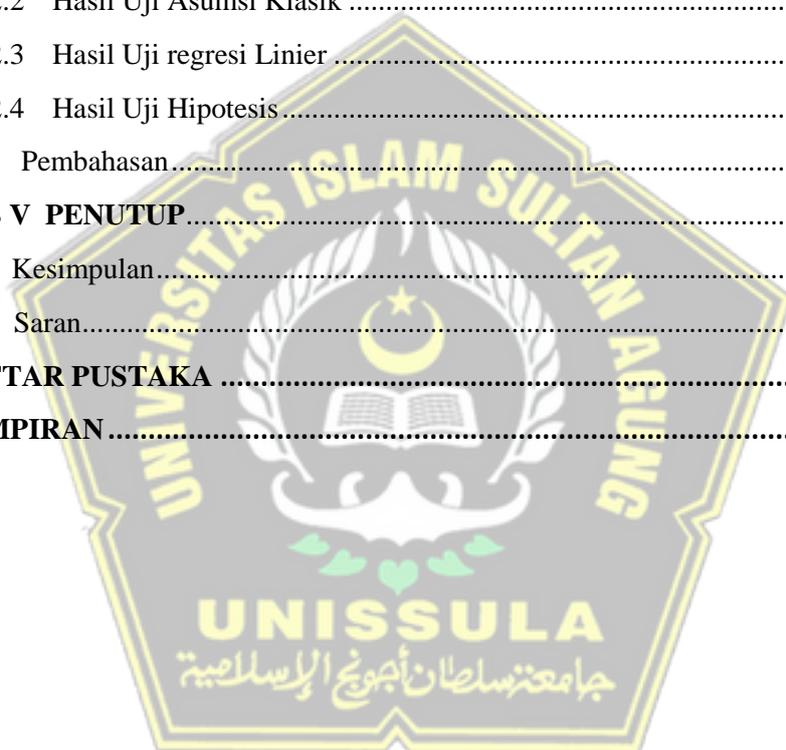
Penulis

Helmi Ardiansyah

DAFTAR ISI

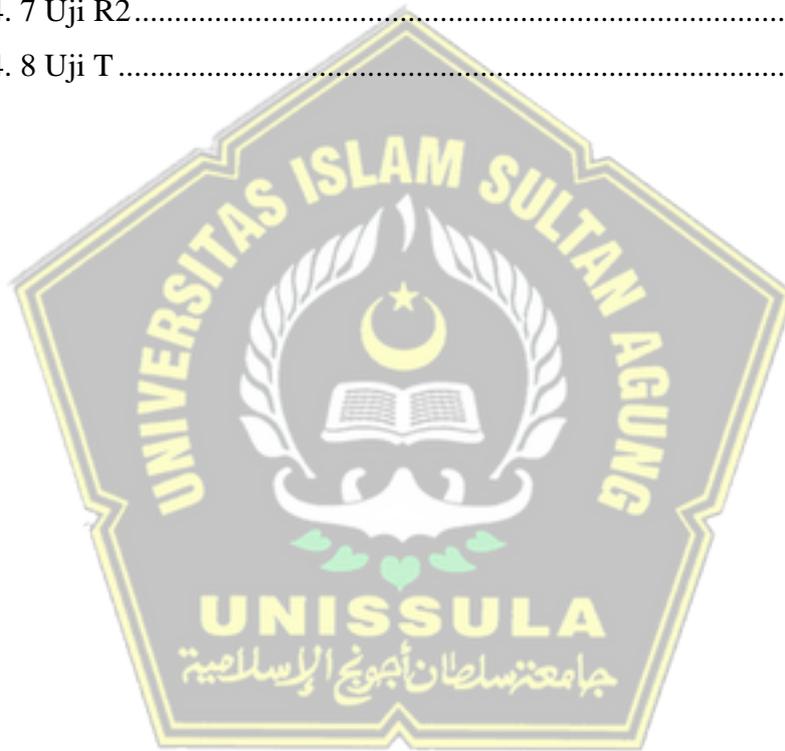
JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSKTRAKSI	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
2.1. Landasan Teori.....	6
2.1.1 Regulasi teori	6
2.1.2 Sanksi Pajak.....	6
2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor.....	7
2.2 Penelitian terdahulu.....	8
2.3 Kerangka pemikiran teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	10
2.3.1 Pengaruh Insentif Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor	10
2.4 Kerangka Penelitian	11
BAB III METODE PENELITIAN.....	13
3.1 Jenis Penelitian.....	13
3.2 Jenis dan Sumber Data	13
3.3 Metode Pengumpulan Data	13
3.4 Definisi operasional dan pengukuran variable	13
3.4.1 Variabel Dependen.....	14
3.4.2 Variabel Independen	14

3.5	Teknik Analisis Data.....	14
3.5.1	Statistik Deskriptif	15
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	15
3.5.3	Uji Analisis Regresi Linier Sederhana.....	17
3.5.4	Uji Hipotesis	17
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		19
4.1	Deskripsi Sampel.....	19
4.2.1	Analisis Data	21
4.2.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	21
4.2.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	22
4.2.3	Hasil Uji regresi Linier	25
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis.....	27
4.3	Pembahasan.....	30
BAB V PENUTUP.....		30
5.1	Kesimpulan.....	30
5.2	Saran.....	30
DAFTAR PUSTAKA		32
LAMPIRAN		33



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	8
Tabel 4. 1 Deskripsi Sampel	19
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif	21
Tabel 4. 3 Uji Normalitas.....	22
Tabel 4. 4 Uji Multikolinieritas.....	23
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastitas	24
Tabel 4. 6 Uji Regresi Linier Sederhana.....	25
Tabel 4. 7 Uji R ²	27
Tabel 4. 8 Uji T	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian.....	11
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menjadi sektor sumber penerimaan daerah Jawa Tengah yang terbesar. Berdasarkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 2 Tahun 2011 yang telah dirubah dengan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 7 tahun 2017, Pajak Daerah Jawa Tengah terdiri Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Rokok, Pajak Alat Berat, Pajak Bahan Bakar Motor, Pajak Permukaan Air, option pajak mineral bukan logam dan batuan. Dari sekian jenis penerimaan pajak, PKB ialah jenis pajak yang berkontribusi besar dalam penerimaan pajak pemerintah daerah. Jumlah penerimaan PKB tahun 2022 sebesar Rp 4.758.837.286.600 atau 40,6 % dari total penerimaan Pajak Daerah Jawa Tengah (Bapenda Provinsi Jawa Tengah)

Jumlah tersebut menunjukkan potensi penerimaan PKB yang lumayan besar sebagai sumber penerimaan pajak daerah. Potensi tersebut berasal dari kendaraan roda dua serta empat di Provinsi Jawa Tengah. Oleh sebab itu jumlah penerimaan PKB diharapkan dapat meningkat setiap tahun. Untuk meningkatkan penerimaan PKB pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menggali faktor yang mempengaruhi penerimaan PKB. Hal ini diperlukan sebagai Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan realisasi PKB. Insentif pajak dalam bentuk sanksi dan dalam insentif

lainnya menjadi salah satu faktor yang menjadi pengaruh penerimaan PKB.

Menurut penelitian Fina Budiarti dan Hana Fadhilah (2022) mengemukakan jika Sanksi pajak menunjukkan terdapat dampak positif pada penerimaan PKB. PKB akan semakin meningkat selaras dengan seringnya pemerintah menjalankan program sanksi pajak. Hasil penelitian juga dilakukan oleh Rismawati (2022) mengemukakan jika insentif sanksi PKB serta pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) punya pengaruh pada penerimaan daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Windi Sigiro, Abdonsius Sitanggang, (2024) menyatakan bahwa penerimaan PKB di Samsat Kab. Dairi ini dipengaruhi oleh Kesadaran Pelayanan Pajak, Wajib Pajak, Sanksi Pajak, serta Pengetahuan Wajib Pajak.

Kajian terdahulu oleh (Zhafira, 2022) mengemukakan jika sanksi PKB mempunyai pengaruh signifikan pada penerimaan PKB.

Berdasarkan fenomena dan persamaan hasil penelitian itu, penelitian ini membuktikan jika kebijakan insentif pajak bernilai positif untuk penerimaan daerah serta tumbuhnya ekonomi.

Sedangkan total kendaraan bermotor yang terdata di Provinsi Jawa Tengah yaitu sebanyak 20.320.743 (BPS Provinsi Jawa Tengah) Pemrov Jawa Tengah lewat Bappenda memiliki program penghapusan sanksi pajak kendaraan yang bisa dimanfaatkan wajib pajak untuk membayar pajak karena terdapat penghapusan sanksi. Program ini berlaku untuk denda PKB,

bebas BBNKB atas kendaraan bekas atau mutasi kendaraan, serta bebas pokok PKB yang nunggak di tahun kelima.

Oleh karena itu Penelitian tentang insentif pajak dan pengaruh pada penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah penting untuk dilaksanakan.

Pada penelitian ini akan dikaji mengenai pengaruh program insentif pajak yang diberikan oleh Pemprov Jawa Tengah pada 2022 terhadap penerimaan PKB Provinsi Jawa Tengah pada 2022. Penelitian ini mengacu pada jurnal Fina Budiarti dan Hana Fadhilah (2022) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Sanksi Pajak, Wajib Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan PKB Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung”

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi teoritis dengan memperkuat hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan PKB. Selain itu harapannya penelitian ini bisa berkontribusi praktis untuk Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah pada usaha peningkatan Penerimaan PKB sebagai komponen dalam Pajak Daerah.

1.2 Rumusan masalah

Penjamin bahwa aturan perundangan tentang pajak akan dipatuhi, ditaati, atau dituruti ialah definisi dari sanksi pajak (Mardiasmo, 2016). Dalam rangka mewujudkan tertib dan teraturnya perpajakan, oleh karena itu dibentuklah sanksi perpajakan yang dikenakan untuk orang yang

melanggar pajak. Fungsi sanksi pajak tersebut ialah dasar pemerintah dalam menentukan wajib pajak yang melakukan pelanggaran peraturan.

Pemerintah telah mengupayakan dalam peningkatan pendapatan penerimaan pajak dengan menerapkan sanksi pada wajib pajak yang tidak membayar atau terlambat membayai pajak yang kemudian hal ini telah tercantum pada UU No. 28/2009 mengenai sanksi administrative terlambat membayar pajak. Pemerintah kemudian juga memudahkan wajib pajak untuk membayar melalui samsat *drive thru* sehingga masyarakat tidak perlu antri di loket dan bisa dengan cepat dan praktis mengurus PKB miliknya. Meski sudah berupaya tetapi pendapatan pajak yang diterima pemerintah masih tidak selaras.

Hal ini disebabkan wajib pajak sudah terbebas dari denda administrasi karena telat membayar pajak. Oleh sebab itu ketika program penghapusan sanksi PKB dilakukan maka wajib pajak yang tidak bayar pajak karena denda administrasi yang sebelumnya diharap tetap membayar pajak lagi karena denda tersebut sudah dihapus di program penutihan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Apakah Sanksi pajak berpengaruh terhadap penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah?

1.4 Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap penerimaan PKB yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharap bisa memperkuat hasil penelitian tentang Pengaruh sanksi pajak pada penerimaan PKB di Jawa Tengah.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan penelitian ini diharap Pemprov Jawa Tengah dapat mengetahui pengaruh sanksi pajak dalam bentuk pemutihan pajak pada penerimaan pajak PKB.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Regulasi teori

Teori regulasi membuka persamaan ekonomi dengan masuknya proses politik serta dilemma etis di masyarakat. Teori regulasi ini tidak diartikan “Regulation” atau aturan. Teori regulasi dalam hal ini mempunyai pendekatan heterodox. Ekonomi tidak hanya berkaitan dengan prinsip maksimalisasi (*Pareto Optimum*) pilihan rasional (*Rational Choice*), dan biaya transaksi (*Transaction Cost*), tetapi berkaitan kebiasaan yang telah ada turun temurun di masyarakat. Regulasi ini dipakai dalam rangka mendorong agar wajib pajak membayarkan pajak sesuai kewajibannya.

2.1.2 Sanksi Pajak

(Mardiasmo, 2016) mengemukakan jika sanksi perpajakan ialah jaminan jika ketentuan perpajakan akan diikuti serta dipatuhi, karena sanksi perpajakan ialah alat untuk menghalangi wajib pajak tidak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Sanksi PKB diatur di UU No. 28/2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada aturan ini disebutkan jika wajib pajak yang tidak melaksanakan pembayaran PKB akan dikenakan sanksi pajak.

Sanksi PKB diharap membuat wajib pajak tau tujuan sanksi, sehingga sanksi berat bisa memberi pelajaran wajib pajak, serta sanksi diberlakukan pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran.

Berdasarkan Wardani, Rumiya (2017) indikator sanksi pajak meliputi :

1. Untuk memberi pelajaran wajib pajak maka sanksi yang berat ini diberlakukan
2. Wajib pajak mengetahui terkait tujuan sanksi PKB.
3. Ketika wajib pajak melanggar maka sanksi harus diberlakukan tanpa toleransi.

2.1.3 Pajak Kendaraan Bermotor

Penerimaan PKB ialah seluruh perolehan maupun pendapatan yang dihasilkan dari PKB contohnya PKB tahunan, denda yang diberlakukan pada wajib pajak yang punya tunggakan, dan pendapatan penerimaan pajak kendaraan lain yang berkorelasi dengan PKB (Budiarti & Fadhilah, 2022). Menurut Samsudin, (2020), penerimaan PKB indikatornya ialah ketika makin banyak wajib pajak otomatis pajak yang diterima akan mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan penerimaan negara sumbernya dari pajak dan penerimaan pajak memiliki peran penting untuk pembangunan nasional. Selanjutnya sosialisasi bisa membantu dalam peningkatan kesadaran wajib pajak untuk

melaksanakan pembayaran pajak dan peningkatan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan pajak ini bisa meningkat melalui dilakukannya peningkatan kualitas pelayanan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka yang menjadi faktor ialah kondisi ekonomi serta sikap dari wajib pajak dalam pembayaran pajak.

2.2 Penelitian terdahulu

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI (TAHUN)	JUDUL	VARIABEL	HASIL
1.	(Budiarti & Fadhilah, 2022)	“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajajaran I Kota Bandung”	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak - Sanksi Pajak - Pemutihan PKB - Penerimaan PKB 	Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pemutihan Pajak punya pengaruh positif pada penerimaan PKB
2.	Rismawati (2022)	“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Insentif Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bebas Bea	<ul style="list-style-type: none"> - PKB - Insentif PKB - Bebas BBNKB - Tingkat Penerimaan Pajak Daerah 	Insentif Penghapusan Denda PKB dan pembebasan BBNKB memiliki pengaruh pada penerimaan

		Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Pada Masa Pandemi Covid-19.”		daerah.
3.	Windi Sigiro, Abdonsius Sitanggang, (2024)	“Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kab. Dairi”	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaruh Pelayanan Pajak - Sanksi Pajak - Kesadaran Wajib Pajak - Pengetahuan Wajib Pajak 	Pengetahuan wajib pajak, pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak punya pengaruh positif pada penerimaan PKB.
4.	Zhafira, (2022)	“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat	<ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak - Kualitas Pelayanan - Sanksi PKB 	Kepatuhan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak punya pengaruh signifikan pada penerimaan PKB.

		Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021”		
--	--	---	--	--

Sumber : Dari berbagai Penelitian Terdahulu 2023

2.3 Kerangka pemikiran teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Insentif Sanksi Pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi pajak ialah sebuah kebijakan yang diturunkan dari regulasi pemerintah, dalam bentuk manfaat pajak, dalam pada aktivitas tertentu, seperti uang untuk aktivitas yang berkualitas. Sanksi pajak diberikan dalam bentuk keringanan bebas denda pajak, sebagai bentuk implementasi dari regulasi pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam bentuk penerimaan PKB. Implementasi dari sebuah regulasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah, termasuk kinerja dalam penerimaan pajak daerah. Dengan adanya implementasi dari regulasi terkait dengan pemberian insentif pajak tersebut, penerimaan daerah dapat meningkat.

Rismawati (2022) mengemukakan jika insentif pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB punya dampak positif pada penerimaan daerah. Windi Sigiyo, Abdonsius Sitanggang, Jonner Pangaribuan (2024) “Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan PKB Di Samsat Kab. Dairi”

Diah Rana (Zhafira, 2022) “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan PKB Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021”

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pada penelitian ini bisa ditarik hipotesis:

H1 : Sanksi Pajak punya pengaruh positif pada Penerimaan PKB

2.4 Kerangka Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Penerimaan PKB sebagai Variabel Dependen menggunakan Sanksi Pajak sebagai Variabel Independen. Berdasarkan uraian tersebut, kerangka penelitian bisa dirumuskan :

Gambar 2.1 Model Kerangka Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian memakai metode kuantitatif dengan uji regresi linier sederhana

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data sekunder diambil dari data penerimaan PKB tahunan BAPENDA JATENG

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik dokumentasi dipakai untuk pengumpulan data di penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk mempelajari catatan maupun dokumen pajak yang selaras dengan data yang dibutuhkan. Dokumen pada penelitian ini ialah data yang diambil dari laporan PKB tahunan periode 2022

3.4 Definisi operasional dan pengukuran variable

Variabel penelitian ialah semua hal dengan berbagai bentuk sesuai ketentuan peneliti untuk mempelajarinya sehingga didapatkan informasi terkait suatu hal itu yang selanjutnya dapat disimpulkannya (Sugiyono, 2018). Variabel penelitian ini ada 2 yaitu independen dan dependen. Variabel Independen dari penelitian ini ialah Sanksi Pajak (X1) dan Variabel Dependen pada penelitian ini ialah PKB (Y)

3.4.1 Variabel Dependen

Berdasarkan Sugiyono (2017, hal 68) Variabel Dependen atau dikenal dengan variable terikat yaitu variable yang menjadi akibat maupun variabel yang dipengaruhi efek adanya variable bebas atau variabel independent. Variabel dependen di kajian ini yaitu PKB.

Pajak Kendaraan Bermotor

PKB yaitu pajak yang diambil terhadap kepemilikan sebuah kendaraan bermotor. Menurut Bernadin (2017) pengukuran PKB dilaksanakan melalui membandingkan total jumlah realisasi pajak kendaraan bermotor yang ada pada di suatu daerah

3.4.2 Variabel Independen

Sanksi PKB

Sanksi pajak yaitu langkat yang diambil negara untuk penertiban wajib pajak yang lama tidak melakukan kewajibannya. Sanksi pajak pada bidang perpajakan menjadi suatu yang penting untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak. Pemutihan pajak ialah sebuah usaha pemerintah daerah untuk meringankan pajak pada masyarakat dan terkhusus tentang pembebasan pokok pajak PKB serta sanksi administrasi.

3.5 Teknik Analisis Data

Model analisis yang dipakai merupakan analisis regresi linier sederhana yang mempunyai tujuan guna mengenali besarnya pengaruh sanksi PKB pada penerimaan PKB.

3.5.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dipakai untuk mentransformasikan data penelitian yang sudah didapat ke dalam tabel, sehingga semakin memudahkan dalam mendeskripsikan maupun menggambarkan data yang sudah terkumpul. Berdasarkan Ghozali (2018) analisis statistik deskriptif dipakai untuk tau gambaran maupun deskripsi seperti maksimum, minimum, *standar deviasi*, rata-rata (*mean*), dan *median* dari variabel dependen yaitu PKB dan variable independent ialah Sanksi Pajak. Statistik deskriptif yaitu bentuk penyajian bermacam ukuran angka yang sangat penting untuk sampel penelitian dan bertujuan memudahkan pemahaman variabel yang dipakai di penelitan.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Tujuan uji ini ialah untuk melihat seberapa layak pemakaian model regresi pada penelitian ini. Uji asumsi klasik dilaksanakan yaitu berikut ini

:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilaksanakan dalam penentuan data yang sudah terkumpul dengan distribusi normal ataupun mengambil melalui populasi normal. Baiknya model regresi ketika mempunyai data dengan distribusi normal. Bagi pengujian distribusi normal ataupun tidak pada data dengan SPSS memakai metode Kolmogrov-Sminov (Ghozali, 2013) agar diketahui distribusi data variabel. Karenanya, nilai absolut

melalui parameter tersebut dapat dijadikan ukuran penyimpangan distribusi normal. Nilai signifikan yang digunakan dalam pengujian normalitas berupa: 1) Ketika nilai signifikansi (Sig.) > alpha (0.05), memiliki arti data berdistribusi normal. 2) Ketika nilai signifikansi (Sig.) < alpha (0.05), memiliki arti data berdistribusi tidak normal.

b. Uji multikolinieritas

Pengujian multikolinieritas dilaksanakan pada pengujian model regresi didapatkan terdapat kolerasi diantara variabel independent, ketika terdapat korelasi berarti adanya problem multikolinieritas. Berdasarkan (Ghozali, 2013), variabel ortogonal ialah variabel bebas dengan nilai korelasi sama dengan nol. Dalam pendeteksian dalam model regresi linier berganda mengenai adanya multikolinieritas memakai nilai VIF serta Nilai Tolerance menggunakan ketentuan berupa: 1.) Ketika nilai VIF > 10 serta nilai tolerance < 0,1 memiliki arti adanya multikolinieritas antar variabel independent.

2.) Ketika nilai VIF < 10 serta nilai tolerance > 0,1 memiliki arti tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independent.

c. Uji heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas ialah perbedaan varian variabel melalui residual bagi seluruh pengamatan model regresi linear serta dipakai dalam mengetahui terdapat penyimpangan atas syarat asumsi klasik

dalam model regresi. Tujuan heteroskedastisitas yaitu menguji apakah ada ketidaksamaan varian dari residual antar pengamatan satu dengan yang lain dalam model regresi. Tidak terjadi heteroskedastisitas ialah model regresi yang baik. Homoskedastisitas terjadi ketika perbedaan residual antara dua pengamatan tetap sama (Ghozali, 2013).

3.5.3 Uji Analisis Regresi Linier Sederhana

Pengujian hipotesis akan dicoba dengan memakai model regresi variable independent terhadap variable dependen. Model persamaannya ialah :

$$Y = \alpha + \beta \cdot X + e$$

Ket :

Y : PKB

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

X : Sanksi Pajak

e : error

3.5.4 Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien determinasi (R²)

Koefisien determinan berguna dalam pengukuran besar kontribusi ataupun pengaruh variabel bebas pada variasi naik-turun

variabel terikat, nilainya ada antara 0 hingga 1. R^2 ialah kemampuan variabel X memberikan penjelasan mengenai variabel Y. Oleh sebab itu disarankan memakai nilai Adjusted R^2 saat melakukan evaluasi model regresi mana yang terbaik (Ghozali, 2013).

Ketentuan nilai R^2 ($0 < R^2 < 1$), (Ghozali, 2013) berupa:

- 1) Ketika R^2 menjauhi angka 1, berarti tidak eratnya korelasi diantara variabel bebas serta variabel terikat ataupun dikatakan model yang tidak baik.
- 2) Ketika R^2 mendekati angka 1, berarti eratnya korelasi diantara variabel bebas serta variabel terikat ataupun dikatakan model yang baik.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)

Uji ini digunakan guna memperlihatkan bukti kemungkinan seluruh variable bebas dipengaruhi secara bersamaan oleh variable terikat yang digunakan pada model regresi (Ghozali, 2013). Ketika nilai F_{sig} melebihi nilai F_{hitung} berarti seluruh variabel independent dengan stimultan memiliki pengeruh pada variabel dependen. Keputusan pengujian F diambil dengan berdasarkan hal berikut :

- 1.) ketika nilai $F_{hitung} < F_{sig}$, berarti variabel bebas punya pengaruh pada variabel terikat.

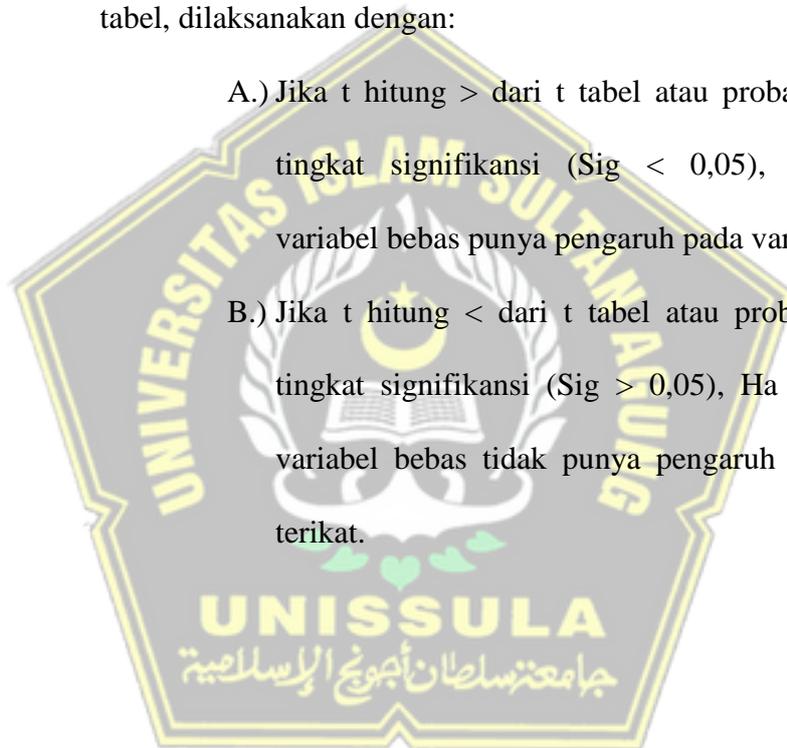
2.) Ketika nilai F-hitung $>$ F-sig, berarti variabel bebas tidak punya dampak pada variabel terikat.

c. Uji Signifikansi Parameter individual (Uji t)

Pada dasarnya uji ini memperlihatkan sejauh apa pengaruh variabel independen menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013). Dalam uji t, nilai t hitung akan dikomparasi dengan nilai t tabel, dilaksanakan dengan:

A.) Jika t hitung $>$ dari t tabel atau probabilitas $<$ dari tingkat signifikansi (Sig $<$ 0,05), H_a diterima, variabel bebas punya pengaruh pada variabel terikat.

B.) Jika t hitung $<$ dari t tabel atau probabilitas $>$ dari tingkat signifikansi (Sig $>$ 0,05), H_a diterima, dan variabel bebas tidak punya pengaruh pada variabel terikat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Populasi dari sampel ini ialah Kantor UPPD yang berada di Jawa Tengah yang totalnya 35 yang terdiri atas 29 Kota serta 6 Kabupaten. Berdasarkan populasi UPPD yang berada di Jawa Tengah tahun 2022, maka penelitian ini memakai sampel jenuh yang asalnya dari UPPD di Jawa Tengah sebanyak 35.

Tabel 4. 1 Deskripsi Sampel

No	Kab / Kota	PKB Pokok	PKB Denda
1.	Kab. Cilacap	Rp 493.912.500	Rp 6.365.942.825
2.	Kab. Banyumas	Rp 504.165.000	Rp 7.314.232.350
3.	Kab. Purbalingga	Rp 136.659.000	Rp 2.733.632.150
4.	Kab. Banjarnegara	Rp 155.363.000	Rp 2.939.935.975
5.	Kab. Kebumen	Rp 134.129.500	Rp 2.883.899.500
6.	Kab. Purworejo	Rp 134.133.000	Rp 1.836.796.645
7.	Kab. Wonosobo	Rp 130.894.500	Rp 2.069.397.475
8.	Kab. Magelang	Rp 210.891.500	Rp 3.976.112.250
9.	Kab. Boyolali	Rp 184.599.500	Rp 3.845.069.550
10.	Kab. Klaten	Rp 338.937.000	Rp 5.486.342.975
11.	Kab. Sukoharjo	Rp 216.476.500	Rp 4.173.516.925
12.	Kab. Wonogiri	Rp 187.737.500	Rp 2.741.319.575
13.	Kab. Karanganyar	Rp 163.391.000	Rp 3.390.974.575

14.	Kab. Sragen	Rp 206.641.500	Rp 3.940.461.500
15.	Kab. Grobogan	Rp 191.274.000	Rp 3.966.743.175
16.	Kab. Blora	Rp 116.143.000	Rp 1.741.666.600
17.	Kab. Rembang	Rp 90.412.000	Rp 1.799.879.275
18.	Kab. Pati	Rp 255.443.000	Rp 4.929.161.675
19.	Kab. Kudus	Rp 234.257.500	Rp 3.340.106.500
20.	Kab. Jepara	Rp 278.407.000	Rp 4.941.349.575
21.	Kab. Demak	Rp 187.889.500	Rp 4.570.431.500
22.	Kab. Semarang	Rp 252.601.000	Rp 5.276.425.700
23.	Kab. Temanggung	Rp 105.848.000	Rp 1.944.674.850
24.	Kab. Kendal	Rp 144.250.500	Rp 3.459.736.900
25.	Kab. Batang	Rp 139.586.000	Rp 2.763.400.300
26.	Kab. Pekalongan	Rp 98.558.000	Rp 2.720.455.250
27.	Kab. Pemalang	Rp 103.299.500	Rp 3.506.823.000
28.	Kab. Tegal	Rp 127.907.000	Rp 4.309.990.125
29.	Kab. Brebes	Rp 133.174.500	Rp 3.304.782.575
30.	Kota Magelang	Rp 66.546.500	Rp 867.894.450
31.	Kota Surakarta	Rp 310.196.000	Rp 5.291.982.375
32.	Kota Salatiga	Rp 79.078.500	Rp 1.449.759.025
33.	Kota Semarang	Rp 1.241.709.500	Rp 19.828.939.375
34.	Kota Pekalongan	Rp 81.127.500	Rp 1.372.416.075
35.	Kota Tegal	Rp 51.609.500	Rp 1.489.344.300
	JUMLAH	Rp 7.487.249.000	Rp 136.573.596.870

Sumber : Data UPPD Provinsi Jawa Tengah

4.2 Analisis Data

4.2.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bisa menjelaskan suatu penelitian. Data tersebut penggambarannya dijelaskan lewat nilai maksimal, rata-rata (*mean*), median, minimum, dan standart deviasi variabel penelitian. Adapun variabel pada penelitian ini yaitu *Sanksi Pajak* sebagai variabel independen, serta PKB variabel dependen. Variabel itu sudah diuji dan diolah dengan statistik deskriptif. Hasil olah data bisa diamati berikut ini:

Tabel 4.2 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Pajak	35	867.894.450.00	19.828.939.375.00	3.902.102.767.7143	3.149.142.482.00430
PKB	35	66.812.411.250.00	790.299.388.900.00	155.215.359.771.4286	120.715.446.561.28436
Valid N (listwise)	35				

Sumber : Data diolah 2023

Menurut hasil olah statistik deskriptif dalam tabel tersebut maka bisa dilihat jika variabel *Sanksi pajak* bernilai minimum yaitu 867.894.450 yang didapat di Kota Magelang. Dan nilai maximum sebesar 19.828.939.375 yang didapat di Kota Semarang. dengan nilai rata-rata sebesar 3.902.102.767.7143 dan nilai standar deviasinya 3.149.142.482.00430.

4.2.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

a.) Uji Normalitas

Uji ini dipakai di pengujian variabel independen serta dependen apakah pinya distribusi normal atau tidak. Uji dalam penelitian ini memakai model regresi dengan *One Sample Kolmogrov-Smirnov* dengan aturan ketika nilai Asymp signifikasi $> 0,05$ maka dianggap berdistribusi normal, begitupun sebaliknya (Sanusi, 2013). Hasil uji normalitas bisa diamati dalam table di bawah :

Tabel 4. 3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000292
	Std. Deviation	27494771249.4 7609300
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.061
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data yang diolah 2023

Menurut keterangan maka ditunjukkan jika variabel dependen dengan independen berdistribusi normal karena diperoleh nilai Asymp signifikasi (2-tailed) berada diatas level signifikasi diatas 0,05 yaitu sebesar 0,200 yang berarti data berdistribusi normal.

b.) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas tujuannya untuk mengetahui apakah di model regresi tidak terdapat kolerasi antar variabel bebas, karena hal itu ialah aturan agar pengujian bisa dikatakan baik. Pendeteksi pada multikolinieritas bisa dilaksanakan dengan mengamati nilai tolerance dan VIF dari hasil analisis regresi. Untuk mendeteksi terjadi ataupun tidaknya multikolonieritas yaitu dengan melakukan perhitungan Tolerance serta VIF (Ghozali, 2013)

Cara pengujian data terbebas dari multikolinieritas yaitu jika nilai tolerance $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Hasil uji mulikolinieritas bisa diamati di tabel:

Tabel 4. 4 Uji Multikolinieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9568345029.194	7577968204.502		1.263	.216		
Sanksi pajak	37.325	1.520	.974	24.559	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan PKB

Sumber : Data yang diolah 2023

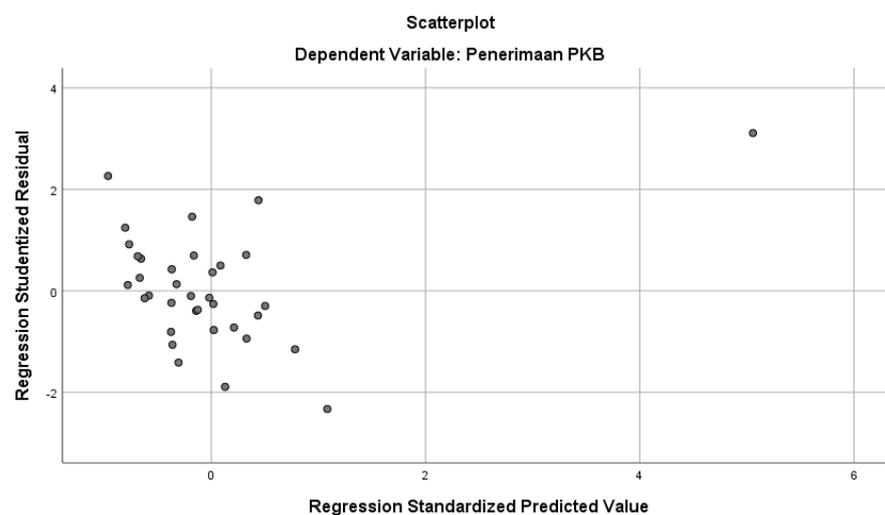
Menurut table 4.4 pengujian menghasilkan semua variabel bebas (Sanksi Pajak) dari memperoleh tolerance $> 0,10$ serta total VIF < 10 yang bisa dikatakan dalam pengujiannya tidak terjadi adanya multikolinieritas yang bisa dikatakan hasil model regresi sudah baik, karena tidak ada hubungan antar pemakaian variabel bebasnya. Uji Multikolinieritas ini dapat diketahui bahwa variabel Sanksi Pajak bernilai *Tolerance* 1.000 dan memiliki nilai *VIF* yaitu 1.000

c.) Uji Heteroskedastitas

Tujuan uji ini ialah mengetahui apakah ada ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen di independen pada model regresi. Tujuan lain uji ini yaitu mengetahui apakah pada model regresi ada ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

Uji heteroskedastisitas di penelitian ini dapat dilaksanakan dengan mengamati grafik *scatterplot* di penelitian ini memakai uji *scatterplot*. Jika sesudah dilaksanakan uji *scatterplot* didapatkan bahwa datanya terletak menyebar, bisa dikatakan data tersebut bebas dari uji heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas yaitu:

Tabel 4. 5 Uji Heteroskedastitas



Sumber : data yang diolah 2023

Melalui grafik *scatterplot* pengujian heteroskedastisitas menghasilkan titik yang menyebar pada bawah serta atas 0 dan juga titik-titik pada grafik scatterplotnya tidak berbentuk suatu pola. Sehingga hasil tersebut berarti

pengujian ini tidak adanya heteroskedastisitas atau dimaknai sifatnya homoskedastisitas.

4.2.3 Hasil Uji regresi Linier

Untuk tau bagaimana pengaruh sanksi pajak pada penerimaan PKB di Jawa tengah maka uji ini digunakan. Hasil uji bisa diamati pada table :

Tabel 4. 6 Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9568345029.194	7577968204.502		1.263	.216
	Sanksi Pajak	37.325	1.520	.974	24.559	.000

Sumber : data diolah 2023

Menurut tabel uji regresi linier, bisa disusun persamaan regresi yaitu:

$$Y = \alpha + \beta.X + e$$

Dari hasil olah data diatas ditemukan bahwa nilai *Constant* sebesar 9568345029.194 koefisien variable bebas (x) yaitu 37.325, kemudian diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 9568345029.194 + 37.325X$$

4.2.4 Hasil Uji Hipotesis

4.2.4.1 Uji koefisien determinasi (R²)

Pengujian ini dalam regresi linier dipakai untuk tau seberapa besaran pengaruh yang diberi variabel bebas pada variabel terikat. Apabila R² kecil artinya kemampuan variabel bebasnya didalam menguraikan variasi variabel terikatnya sangat terbatas. Sedangkan apabila nilai R² semakin besar, maka kemampuan variabel bebasnya didalam menguraikan variasi variabel terikatnya semakin besar. Hasil uji tersebut bisa dilihat di table ini :

Tabel 4. 7 Uji R²

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.974 ^a	.948	.947	27908249657.9 7670

a. Predictors: (Constant), Sanksi pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan PKB

Sumber : Data yang diolah tahun 2023

Menurut tabel diketahui hasil uji koefisien determinasi memperlihatkan dimana didapat nilai *Adjusted R-square* besarnya 0,947

Hal tersebut memperlihatkan jika sanksi pajak berpengaruh pada penerimaan PKB besarnya 94,7% dan sisanya 5,3% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan dalam model ini.

4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)

Uji ini mempunyai tujuan mengukur dimana variabel bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh signifikan pada variabel terikatnya di tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2013). Dasar pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis pengujian ini dapat dilihat pada probability value. Jika nilai $p > 0,05$ maka variabel bebas tidak punya pengaruh pada variabel terikatnya kemudian jika $p < 0,05$ maka variabel bebas punya pengaruh pada variabel terikat. Hasil uji F yang diperoleh di penelitian ini bisa diamati di tabel :

Tabel 4.8 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4697527241425 95600000000.0 00	1	4697527241425 95600000000.0 00	603.121	.000 ^b
	Residual	2570272316607 4570000000.00 0	33	7788703989719 56700000.000		
	Total	4954554473086 70200000000.0 00	34			

a. Dependent Variable: Pajak Kendaraan Bermotor

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak

Berdasarkan tabel diatas, bisa diperoleh nilai probability value yang ditunjukkan pada nilai signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable Sanksi Pajak punya pengaruh pada penerimaan PKB.

4.2.4.3 Uji Parsial (Uji T)

Uji ini dilaksanakan untuk mengamati sejauh apa pengaruh variabel independen yang parsial pada variabel dependennya dengan pengujian di tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2013). Ketika nilai $p > 0,05$, secara parsial variabel bebas tidak punya pengaruh pada variabel terikat sebaliknya jika $p < 0,05$ maka secara parsial variabel bebas punya pengaruh pada variabel terikat. Hasil uji T bisa diketahui dalam tabel :

Tabel 4. 9 Uji T

Coefficient		
Model		Sig
1	Constant	.216
	Sanksi Pajak	.000

Sumber : Data yang diolah 2023

Menurut tabel tersebut dengan mengamati nilai Sig. Bisa dijelaskan sebagai berikut:

Dari hasil pengujian pengaruh Sanksi Pajak pada Penerimaan PKB diperoleh dengan nilai signifikansi 0,000. H_0 ditolak dan H_1 diterima karena nilai signifikansi $< 5\%$.

Menurut hasil Uji T bisa diambil simpulan jika Sanksi Pajak punya pengaruh positif dan signifikan pada Penerimaan PKB. Dengan kata lain menunjukkan bahwa semakin banyak program Pemutihan Pajak yang dilaksanakan Pemerintah, maka Penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah akan semakin tinggi.

4.3 Pembahasan

Dengan hasil yang sudah didapat dari beberapa pengujian yang telah dilaksanakan, maka peneliti akan memberi penjelasan lebih rinci dan membahas lebih detail mengenai hipotesis yang telah dihasilkan. Pengaruh sanksi PKB berpengaruh pada penerimaan PKB di Jawa Tengah periode 2022

Hasil penelitian ini sanksi pajak memperlihatkan hasil signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berhasil melaksanakan program pemutihan pajak guna memenuhi jumlah penerimaan PKB. Dan dari sisi masyarakat pun program pemutihan pajak ini begitu membantu masyarakat yang mempunyai beban denda PKB karena dihapuskan melalui program pemutihan pajak yang diselenggarakan pemerintah.

Melalui keringanan denda tersebut, masyarakat / pemilik kendaraan bermotor akan terdorong untuk melaksanakan pembayaran PKB sehingga bisa membuat peningkatan penerimaan PKB

Hal ini selaras dengan kajian yang dilaksanakan Budiarti & Fadhilah, (2022), Windi Sigiro, Abdonsius Sitanggang, (2024), Zhafira, (2022) dimana menunjukkan pengaruh sanksi pajak punya pengaruh positif signifikan pada penerimaan PKB.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ialah mendapat bukti empiris tentang Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penerimaan PKB di Provinsi Jawa Tengah 2022 yang memakai metode analisis regresi linier sederhana pada hasil pengujian berupa 35 sampel yaitu 29 Kabupaten serta 5 Kota di Jawa Tengah, maka bisa disimpulkan:

- Secara uji t (parsial), sanksi pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada penerimaan PKB di Jawa Tengah tahun 2022, yang dibuktikan dari peningkatan penerimaan Pajak Kendaran Bermotor setelah penghapusan sanksi administrasi, sehingga hipotesis ini dalam penelitian ini **diterima**.
- Secara uji F (simultan) diketahui PKB memiliki pengaruh terhadap. Karenanya diketahui kesimpulan berupa model regresi yang digunakan cocok dipakai dalam penelitian berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak terhadap penerimaan PKB”

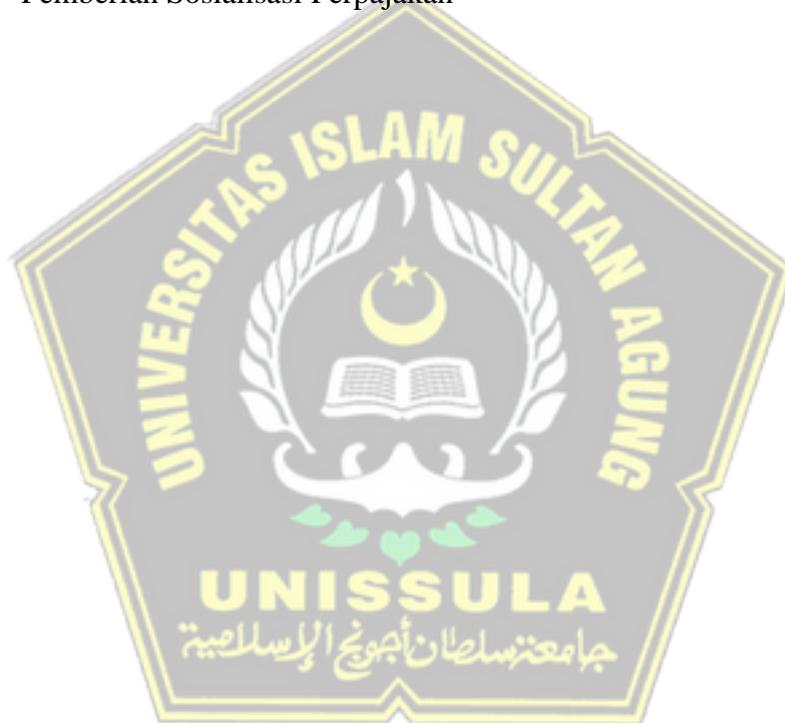
5.2 Saran

Untuk memenuhi penerimaan PKB di Jawa Tengah penulis menyarankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk rutin menyelenggarakan program Pemutihan Pajak dengan menghapus biaya / beban sanksi ini minimal setiap tahun dan melakukan sosialisasi terutama di daerah terpencil agar masyarakat mengetahui informasi ini karena semakin banyak masyarakat yang

mengetahui program pemutihan pajak ini akan berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor juga akan banyak.

Agenda untuk penelitian mendatang untuk memperbaiki / memperkuat penelitian ini adalah menambahkan variabel yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan PKB seperti :

- Pembebasan BBNKB
- Pemberian Sosialisasi Perpajakan



DAFTAR PUSTAKA

2009, U.-U. N. 28 T. (2009). UU No 28 Tahun 2009. *UU No 28 Tahun 2009*, 2(5), 255. [https://www.pajakku.com/tax-guide/8333/UU/28 TAHUN 2009](https://www.pajakku.com/tax-guide/8333/UU/28%20TAHUN%202009)

Budiarti, F., & Fadhilah, H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pajakajaran I Kota Bandung. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 16(8.5.2017), 2003–2005.

Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS Edisi Ketujuh*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Andi.

Sanusi, A. (2013). *Metodologi penelitian bisnis*. salemba empat.

Sugiyono. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.

Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, CV.

Undang-undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (2014). Undang-undang no. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. *Lincolin Arsyad*, 244. <https://doi.org/http://dx.doi.org/110.21043/equilibrium.v3i2.1268>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, P. K. (2009). Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.

Undang-Undang No.25 Tahun 2009, tentang P. P. (2009). UU No. 25 Tahun 2009. *Экономика Региона*, 19(19), 19.

Wardani, D. K., & Rumiyaatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Windi Sigiuro, Abdonsius Sitanggang, J. P. (2024). Pengaruh Pelayanan Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kab. Dairi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT)*, 3.

Zhafira, R. (2022). *Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak terhadap Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Selama Masa Pandemi Covid-19 pada Kantor Samsat Wilayah Jakarta Timur Tahun 2021* (Vol. 4, Issue 1). JUPASI. <http://ojs.stiami.ac.id>